

SLPHT SEBAGAI LEMBAGA PEMBERDAYAAN PETANI

(IPM Farmers Field School, an Agent of Farmers Empowerment)

Edhi Martono

ABSTRACT

Farmers empowerment through informal institution has a long history in modern Indonesian farming. Some groups evolved from farmers' own initiative, but many were formed after the government's urging. SLPHT (Integrated Pest Management Farmer Field School), an unconventional way to release IPM program and concept has relatively succeeded in institutionalizing farmers by dynamizing farmer groups. Although this has been an advantageous progress, the problem lies in care, management and funding for those institutized empowerment. Without careful planning in maintenance, management and funding, the success of these efforts may prove futile.

Key words: farmers empowerment, institutional, Farmers Field School.

Salah satu persoalan bidang pertanian yang barangkali ikut bertanggungjawab atas kurang produktifnya lahan adalah ketertinggalan teknologi. Persoalan ini bukan semata masalah teknis, namun juga erat kaitannya dengan budaya, persepsi, sikap, kinerja pembina, motivasi pendamping dan berbagai kendala non-teknis lain yang acapkali lebih besar perannya daripada masalah alih teknologi. Masalah non-teknis umumnya sulit diurai secara empirik, sehingga dalam menghadapinya diperlukan pandangan dan wawasan yang luas.

Menyampaikan teknologi melalui informasi yang benar (baik untuk petani yang cukup tahu maupun yang—apalagi—belum tahu teknologi) tentu akan sangat tidak praktis jika disampaikan secara individual. Karenanya, satu soal ini saja sudah amat memadai dipergunakan sebagai pembenar perlunya model kelembagaan yang tepat di kalangan petani. Bila dihubungkan dengan keperluan lain, seperti pemberdayaan dan pengelolaan sumberdaya, lembaga terstruktur

pada tingkat petani jelas amat diperlukan.

Dalam sejarahnya, kelembagaan petani muncul bersamaan dengan kebutuhan pengaturan air irigasi, sehingga dibentuk P3A (Perhimpunan/Perkumpulan Petani Pemakai Air) atau yang sejenis itu. Pembentukan itu ada yang melalui proses tradisi (misalnya petani subak di Bali), atas ide petani, atau model top-down (dengan “instruksi” dan pemerintah/dinas terkait). Kelembagaan semacam ini diperlukan terutama karena pengaturan air merupakan kebutuhan strategis petani yang sangat berpotensi konflik jika tak dibicarakan dengan baik. P3A memang lebih merupakan lembaga arbitrase, belum banyak yang meluas fungsinya sebagai lembaga alih teknologi atau penyalur saprodi.

Perkembangan selanjutnya adalah kelembagaan yang muncul dari kebersatuan kelompok suluhan, yang awalnya adalah kelembagaan kelompok pendengar. Kelompok ini kemudian meluaskan diri masih dalam kerangka penyuluhan, yakni menjadi *klompencapir*. Kepa-

da kelompok inilah dilakukan proses alih teknologi dengan metode penyuluhan konvensional, seperti model ceramah, petak demonstrasi, pertemuan rutin kelompok, namun kebanyakan anggota kelompok masih dengan bebas mengerjakan tanah garapan masing-masing.

PEMBERDAYAAN MELALUI PHT

Ketika serangan hama wereng batang padi coklat pada tahun 1970an menyebabkan kerusakan dan kerugian besar pada pertanaman padi di Indonesia, cara pandang baru terhadap pengendalian hama segera dipikirkan dan diterapkan untuk menghadapi jasad pengganggu. Lahirlah konsep dan program Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) padi di Indonesia, yang pada gilirannya dikembangkan juga pada komoditas selain padi. Bukan hanya metode dan teknik pengendalian hama yang berubah, namun lebih penting adalah perubahan pemikiran dan cara pandang, sebab pada awalnya PHT adalah proses pemilihan, perpaduan dan penerapan cara pengendalian hama yang didasarkan pada perhitungan dan penilaian konsekuensi ekonomi, ekologi, dan sosiologi (Bottrell, 1979).

Penerapan konsep PHT tidak menggantung diri pada pendekatan unilateral, misalnya hanya dengan pengendalian kimiawi saja. Sebaliknya, PHT memadukan berbagai teknik pengendalian yang sesuai dengan kondisi ekosistem dan sistem masyarakat. Pendekatan yang dilakukan haruslah terpadu, bersistem, komprehensif dan dinamis bukan pendekatan seragam, instruktif, statis dan parsial (Untung, 2002). PHT sebagai pendekatan sosiologis

mendorong pemberdayaan petani dalam pengambilan keputusan dan tidak semata menggantungkan diri pada keputusan atau rekomendasi pihak lain termasuk pihak pemerintah atau peneliti.

Persoalannya adalah bagaimana menyampaikan konsep dan program PHT secara tepat kepada para petani, karena dilihat dan sifatnya, program dan teknologi PHT memerlukan jabaran, sebab terlampau rumit untuk disampaikan pada tingkat lapangan. Keadaan semakin kompleks jika diingat bahwa kondisi petani Indonesia dibatasi oleh beberapa hal seperti misalnya tingkat pendidikan SDMnya, kondisi sumber daya alam, kepemilikan lahan dan ketersediaan dana. Tujuan pemasyarakatan PHT sebenarnya lebih ke pemberdayaan petani untuk pemanfaatan sumber daya yang terbatas dalam menyelesaikan masalah, daripada usaha mendorong penerapan teknologi yang belum dikuasai, apalagi jika masukannya berasal dari luar lingkungan petani.

Mengingat itu, penerapan konsep PHT memerlukan pencermatan konsep, prinsip dan paradigma yang khas dan berbeda dengan negara maju. Orientasi konsep PHT negara maju pada umumnya lebih banyak ke penerapan teknologi pengendalian. Pendekatan kelembagaan yang dilakukan di Indonesia adalah dengan membentuk model latihan dan penyuluhan yang disebut Sekolah Lapang PHT atau SLPHT.

Model ini secara massif diterapkan kepada petani padi sejak tahun 1989 sampai 1998. Jumlah petani yang telah dilatih mencapai lebih dari 1 juta orang, ditambah dengan sekitar 50.000 petani

yang mengikuti SLPHT sayuran dataran rendah dan dataran tinggi. Pada mulanya kegiatan pelatihan model SL ini difasilitasi oleh BAPPENAS (1989-1993), kemudian dilanjutkan oleh Departemen Pertanian (1993-1998). Kegiatan pelatihan ini oleh dunia internasional dianggap berhasil memberdayakan petani kecil dan kelompok tani sehingga diadaptasi oleh negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk berbagai jenis komoditas. Waage (1996) menganggap pendekatan ini sebagai paradigma baru yang disebutnya dengan pendekatan PHT ekologi.

Secara prinsip pelatihan dalam bentuk SL dilaksanakan dalam satu musim tanam, dan dilangsungkan di lahan. Dasar pelatihannya adalah pendidikan orang dewasa (*andragogi*) secara partisipasi (*participatory training*), dengan tujuan mengubah perilaku peserta pelatihan. Tujuan ini dicapai tidak hanya dengan pembelajaran tetapi juga dengan latihan berinteraksi, pembentukan kesadaran (*awareness*), kemandirian (*self-reliance*) dan latihan pembebasan (*emancipation*) (Dilts, 1986). Dengan demikian visi pelembagaan petani melalui pelatihan ini adalah pemberdayaan petani dalam mengambil keputusan pengelolaan ekosistem pertanian berdasar prinsip PHT untuk peningkatan kesejahteraan petani sendiri.

Prinsip-prinsip PHT yang dijadikan dasar ada empat, yakni (1) budidaya tanaman sehat, (2) pelestarian dan pemanfaatan musuh alami, (3) pengamatan/pemantauan lahan secara berkala, (4) petani sebagai ahli PHT di lahannya.

Keempat prinsip ini diterapkan ke dalam dinamika kelompok tani sebagai upaya pemberda-

yaan baik pada tingkat lembaga maupun individu.

Dalam model pelatihan dengan metode SL, asas penting yang dipergunakan sebagai landasan ada beberapa hal, yaitu (1) sarana belajar utama ada di lahan, bukan dalam kelas, (2) peserta belajar dan pengalaman sendiri untuk menyelesaikan masalah, (3) kajian ekosistem dilakukan untuk pengambilan keputusan pengelolaan, (4) metode dan bahan yang dipergunakan praktis dan tepat guna, (5) kurikulum disusun berdasar keterampilan yang dibutuhkan dan kondisi ekosistem setempat, (6) pemandu lapangan berfungsi sebagai teman belajar dan fasilitator, (7) petani adalah pengambil keputusan di lahannya sendiri, (8) petani menerapkan empat prinsip PHT di lahannya.

Ketika program SLPHT dengan dukungan dana pinjaman Bank Dunia diakhiri tahun 1998, sungguh sayang bahwa pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian, tidak memiliki—dan tidak segera menyusun—mekanisme kelanjutan program ini sehingga dapat lebih “*self-evolving*”. Pada kenyataannya, pendekatan penanganan yang dilakukan lembaga resmi pada saat SLPHT merupakan suatu proyek, benar-benar dilakukan dengan pendekatan proyek. Akibatnya setelah proyek selesai, keberlanjutannya tidak terpikirkan. Pada hal program SLPHT amat berpeluang besar untuk menghasilkan petani yang mandiri, profesional dan memiliki wawasan bisnis yang baik. Saat ini beberapa pemerintah daerah seperti DIY dan Jawa Tengah masih mencoba menghidupkan program SLPHT dengan dukungan dana APBD yang amat terbatas. Beberapa kelompok tani juga mencoba melaksanakan SLPHT Swadaya dengan didampingi oleh petani

pemandu. Profesionalitas dan kemampuan berorganisasi para “alumni” SLPHT ditunjukkan dengan telah terbentuknya IPPHTI (Ikatan Petani Pengelolaan Hama Terpadu Indonesia), terarahkannya petani peserta SLPHT ke pertanian organik yang memasarkan produk bebas residu, dan semakin beranekaragamnya komoditas yang dicoba ditanam oleh petani eks SLPHT.

Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian semenjak 2000 juga mencoba menerapkan model SLPHT kepada petani pekebun di 11 propinsi, pada komoditas kakao, kopi, teh, lada, jambu mete dan kapas. Saat itu diharapkan dalam waktu empat tahun sejumlah 106.000 orang petani pekebun telah mengikuti SLPHT. Laporan yang ditulis Untung (2002) dalam mencermati pelaksanaan SLPHT Perkebunan menyebutkan temuan sebagai berikut:

1. Terjadi perubahan persepsi dan peningkatan pengetahuan petani tentang berbagai aspek pengelolaan kebun, sehingga SLPHT membuka peluang petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya sebagai petani profesional
2. Kepercayaan diri petani baik secara individu maupun secara kelompok meningkat setelah mengikuti SLPHT
3. Penggunaan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya mengalami perubahan berarti ke arah yang lebih rasional dan lebih tepat
4. Terjadi penurunan populasi dan serangan jasad pengganggu yang cukup signifikan di beberapa propinsi yang pekebunnya mengikuti SLPHT. Komoditas utama yang sering

menjadi mangsa jasad pengganggu seperti teh, kopi, dan kakao, mengalami penurunan populasi dan serangan jasad antara 15-60%.

5. Tingkat produksi dan kualitas produk hasil kebun petani peserta SLPHT meningkat
6. Terjadi peningkatan pendapatan petani karena hasil yang diperoleh lebih baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

MASA DEPAN KELOMPOK TANI PHT

Apabila dicermati lebih jauh lagi, sesungguhnya masih terdapat banyak kendala untuk mempertahankan dan mengadopsi model pemberdayaan petani melalui SLPHT di Indonesia. Konsep PHT masih sering dicurigai sebagai konsep pendekatan sepihak para ahli hama dan penyakit, padahal kata kuncinya terletak pada “terpadu”, bukan pada “pengelolaan hama” saja. Dengan demikian masih banyak ahli pertanian—praktisi, peneliti maupun birokrasi—yang menganggap pendekatan PHT sebagai sentimen sektoral dari para pakar perlindungan tanaman. Hal ini juga menyebabkan persepsi, cara pandang, dan tingkat kepercayaan terhadap cara melembagakan keberdayaan petani melalui SLPHT belum optimal. Barangkali jika nanti telah terbukti bahwa model SL ini berhasil di negara lain, baru adopsi dilakukan di negara kita. Jika yang ditunggu kondisi seperti ini, pastilah apa yang kita lakukan sudah terlambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bottrell, D.G. 1979. *Integrated Pest Management*. Council of Environ. Qual., Washington, D.C. 120 p.
-

- Dilts, R. 1986. *Latihan: Menyekolahkan Kembali Masyarakat*. Prisma Edisi 2/1986. LP3ES, Jakarta.
- Untung, K. 2002. *SLPHT Sebagai Wahana Pemberdayaan Petani menjadi Pelaku Agibisnis Profesional*. Makalah Seminar Nasional Sapta Windu Fakultas. Pertanian UGM, 28 September 2002, 12 hal. Yogyakarta.
- Waage, J. 1996. *Integrated Pest Management and Biotechnology: An Analysis of Their Potential for Integration*. In Persley (ed.) *Biotechnology and Integrated Pest Management*. CAB International, Cambridge: 37-60. London.